



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PROLEGNAS 2015-2019 DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2015.**

TANGGAL 2 FEBRUARI 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II.
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 2 Februari 2015.
Pukul	: 10.45 WIB – 12.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Jakarta.
Acara	: Membahas penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: H. Firman Subagyo, SE.,MH.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,M.Si.
Hadir	: 18 orang dari 35 orang Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Subagyo, SH.,M.Si.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Anggota Panja untuk memberikan pandangan/masukan terhadap penyusunan Prolegnas.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap sejumlah usulan RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 mendapatkan tanggapan/masukan dari Anggota sebagai berikut:

1. Banyak usulan RUU yang sifatnya harus dikerjakan terlebih dahulu dan ini akan terkait dengan sikap politis DPR.

2. Judul RUU yang berbeda namun substansinya sama/mirip untuk dipertimbangkan digabungkan menjadi satu RUU.
3. RUU yang sudah dalam tahap Pembicaraan Tingkat I pada periode Tahun 2009-2014 perlu dipertimbangkan untuk masuk Prolegnas.
4. Perlu kajian secara mendalam terkait dengan RUU tentang Sistem Transportasi Nasional mengingat banyaknya korban kecelakaan di jalan raya.
5. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015 mengingat RUU sudah hampir diselesaikan pembahasannya pada periode keanggotaan Dewan sebelumnya tinggal menyisakan 1 substansi terkait dengan subsidi kepada rakyat dalam memperoleh rumah.
6. Judul RUU tentang Perkoperasian bukan RUU tentang Perubahan terhadap UU tentang Perkoperasian karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Dalam penyusunan Prolegnas jangan menggunakan prinsip akomodatif yang cenderung akan menampung semua usulan RUU, namun berdasarkan pada urgensi dan mempertimbangkan RUU yang dalam periode sebelumnya sudah dalam tahap pembicaraan tingkat I.
8. Usulan RUU dari fraksi-fraksi apabila dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahunan harus ada kesiapan Naskah Akademik dan draft RUU.
9. Diusulkan agar RUU yang terkait dengan lebih 2 sektor komisi sebaiknya penugasan pembahasannya oleh Badan Legislasi, misalnya RUU tentang Pertembakauan yang merupakan sektor Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi XI.
10. Dalam penyusunan Prolegnas tahunan juga harus dipertimbangkan waktu/tahun-tahun kinerja DPR optimal dan tidak optimal.
11. Fraksi mengharapkan jatah/alokasi usulan RUU sebaiknya diakomodir dalam Prolegnas yang selanjutnya dapat diusulkan oleh Anggota DPR.
12. Dalam penyusunan Prolegnas hendaknya jangan dilakukan secara tergesa-gesa, karena yang dibicarakan bukan hanya masalah kuantitas tetapi hal-hal yang bersifat substantif/kualitas.
13. Perlu dirumuskan politik hukum yang jelas dalam 5 tahun ke depan yang akan dicapai, sehingga Prolegnas tidak hanya menawarkan daftar RUU saja namun juga terkait dengan masalah evaluasi UU.
14. Pertimbangan terpenting dalam menentukan usulan RUU dalam Prolegnas didasarkan pada aspek substantif, teknis, dan politis.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panitia Kerja (Panja) dalam penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

Rapat ditutup pukul 12.30WIB.

Jakarta, 2 Februari 2015
**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS,**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,M.SI.
NIP. 197104031996032001.

